

PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN TANAH HAK MILIK PERORANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI (STUDI KASUS DI DESA PURWOSARI KECAMATAN WONOGIRI).

Oleh:

Novita Puspaningrum¹, Rafael Edy Bosko²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dengan tanah hak milik perorangan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri serta untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi para pihak dalam tukar menukar tanah kas desa dengan tanah hak milik perorangan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini bersifat empiris dengan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode kajian kepustakaan dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data primer diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian (1) Proses Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dengan Tanah Hak Milik Perorangan Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri hanya dapat dilaksanakan dengan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang barulah dapat melakukan pelepasan dan permohonan hak serta pendaftaran tanah, namun tukar menukar tanah kas desa di Desa Purwosari belum selesai sampai dengan tahap pendaftaran tanah meskipun telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang (2) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Tukar Menukar Tanah Kas Desa Dengan Tanah Hak Milik Perorangan Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri akan terlaksana apabila hak atas tanah objek tukar menukar telah didaftarkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 UUPA, penguasaan tanah (*land tenure*) tidak menjadikan hak para pihak yang telah mengelola tanah objek tukar menukar dilindungi oleh hukum.

Kata Kunci: Tukar Menukar, Tanah Kas Desa, Tanah Hak Milik Perorangan, Perlindungan Hukum, Penguasaan Tanah (*land tenure*)

¹ Pogung Lor rt 10 blok E no 1005, kelurahan Sinduadi, kecamatan Mlati, Sleman, Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

THE IMPLEMENTATION OF THE EXCHANGE OF VILLAGE LAND WITH
INDIVIDUAL LAND FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC INTERESTS IN
WONOGIRI

(Case study in Purwosari Village, Wonogiri Sub-district)

By

Novita Puspaningrum¹, Rafael Edy Bosko²

ABSTRAC

This research aims to identify and understand the process of implementing village land exchanges with individual land for the development of public interests in Purwosari Village, Wonogiri Regency, Wonogiri Regency and to know and understand legal protection for parties in conducting village land exchanges with individual land for the development of interests common in Purwosari Village, Wonogiri Regency, Wonogiri Regency.

This research is an empirical study that has secondary data and primary data. Secondary data was obtained from the research literature with literature studies and methods of data collection tools such as document studies. Primary data is obtained directly from interviews with data collection tools such as guidelines for interviews. Data were analyzed qualitatively.

The results of the research are (1) the implementation of the village land exchange with individual land for the development of public interests in Purwosari Village, Wonogiri District, Wonogiri Regency can only be done with permission from authorized officials. The exchange of village land in Purwosari is not completed until the land registration stage though has received permission from the competent authority (2) Legal Protection for Parties in the implementation of village land exchange with individual land for the development of public interests in Purwosari Village, Wonogiri Regency, Wonogiri Regency will only be fulfilled if the object of exchange of land rights is registered as stipulated in Article 19 BAL (UUPA), land tenure does not make the rights of the parties that have managed objects of land exchanges will be protected by law.

Keywords: Exchange, Village Land, Individual Land, Legal Protection, Land Tenure

¹ Pogung Lor rt 10 blok E no 1005, kelurahan Sinduadi, kecamatan Mlati, Sleman, Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.